



**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR



uji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang atas karunia dan kekuasaannya kami dapat menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur. Laporan ini menyajikan uraian penjelasan tentang capaian sasaran, program dan kegiatan serta Sub kegiatan yang telah kami laksanakan dan disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban secara nyata untuk menuju terciptanya kondisi yang tertib, aman, damai dan dinamis sehingga dapat mewujudkan ***“Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya”***.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur pada Tahun Anggaran 2023. Disamping sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini juga berfungsi sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur serta sebagai bahan untuk koreksi kegiatan yang tercantum pada rencana strategis selama 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 masih banyak kelemahan dan jauh dari sempurna sehingga kami perlu saran dan koreksi dari semua pihak. Namun demikian besar harapan kami kiranya laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan dan pertimbangan lebih lanjut dari pimpinan.

Malili, Januari 2024

Kepala Satuan

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

Pangkat: Pembina Utama
Muda

NIP. 19701103 199003 1
002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Rencana Strategis	7
a. Visi dan Misi	7
b. Tujuan Strategis	8
c. Sasaran Strategis	9
d. Indikator Kinerja Utama	9
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	13
3.2. Realisasi Anggaran	52
BAB IV PENUTUP	62
4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja.....	62
LAMPIRAN	

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur tahun 2023 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud

- a. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban kinerja yang terukur secara tertulis kepada Bupati Luwu Timur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur visi dan misi Bupati Luwu Timur serta tujuan dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip good governance.

Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah:

Adapun tujuan penyusunan Laporan evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 adalah:

- a. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- b. Melakukan perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- c. Menerapkan fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur di dalam pelaksanaan

e. program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Data Umum Perangkat Daerah

1. Data Kepegawaian

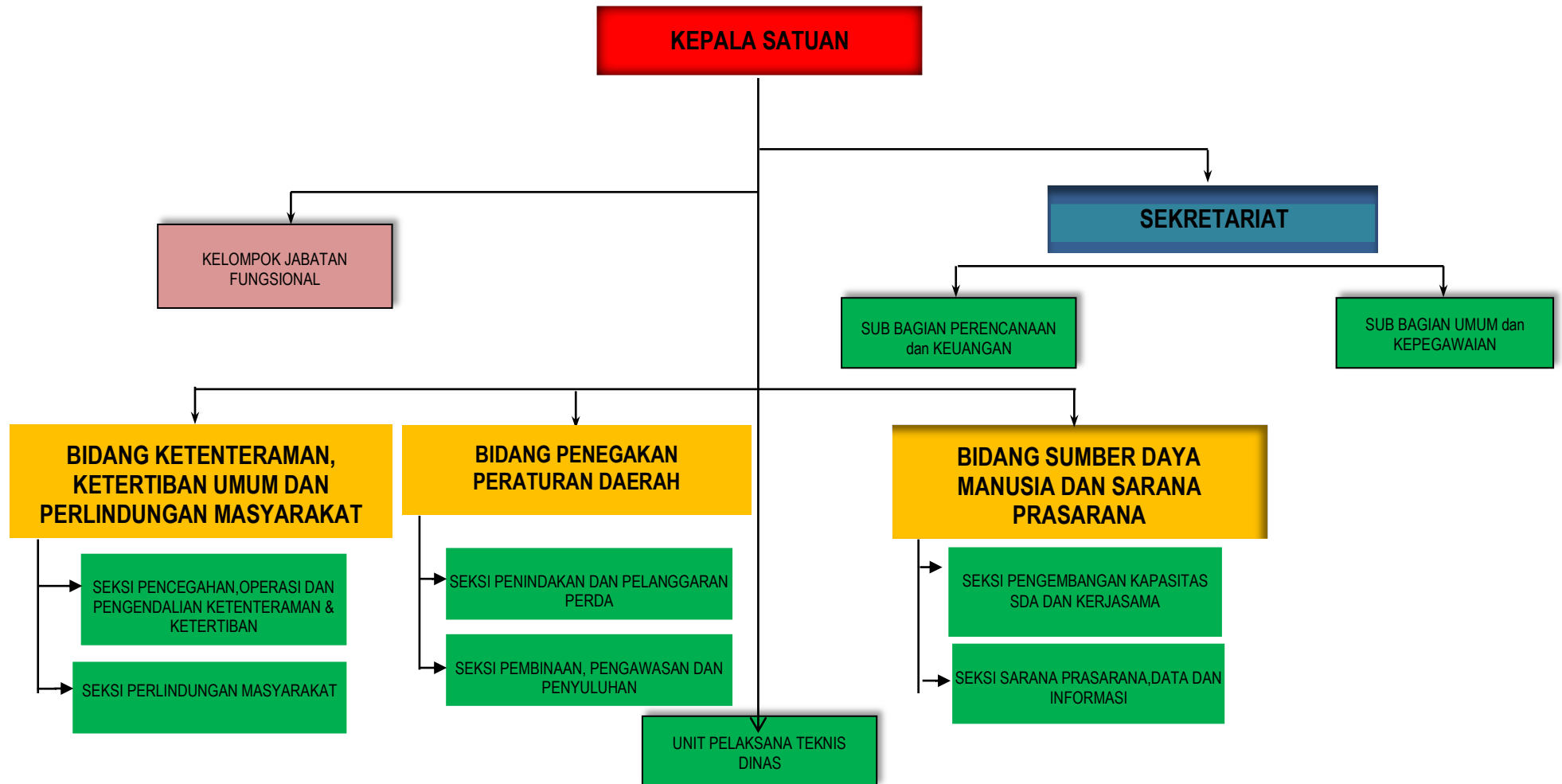
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat khususnya sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam penyelenggaraan urusan tersebut Satpol PP memiliki peran penting dan strategis serta mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi Pemerintah Daerah dalam menjalankan Pemerintahan.

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, penjabaran dari ketentuan tersebut telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unit kerja yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur, susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja d Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Gambar 1
 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
 Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor Tahun 2021



Jumlah PNS dan Non PNS

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2023 didukung oleh personil sebanyak 228 orang yang terdiri 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 1 Orang dan 188 Non-PNS atau tenaga upah jasa. Berikut rincian data personil pada Satpol PP Tahun 2023.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Luwu Timur Tahun 2023

NO.	GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SMA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	IV	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
2	III	-	-	19	5	-	-	-	-	-	-	-	-	19	5
3	II	-	-	-	-	-	-	10	3	-	-	-	-	10	3
4	CPNSD	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PPPK	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
6	HONORER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	UPAH JASA														
	- BANTUAN SATPOL PP	-	-	17	6	2	1	123	36	-	-	-	-	142	49
	- SOPIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- CLEANING SERVICE	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.2
Jumlah Pejabat Struktural/Eselon
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO.	PEJABAT STRUKTURAL/ES ELON	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	II.a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	II.b	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4	III.b	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
5	IV.a	-	-	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3
6	IV.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	-	7	3	-	-		-	-	-	-	-	9	3

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

Tabel 1.3
Jumlah Pejabat Fungsional
berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin
Pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023

NO.	PEJABAT FUNGSIONAL	JUMLAH PEGAWAI KUALIFIKASI PENDIDIKAN												TOTAL	
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ SEDERAJAT		SMP/ SEDERAJAT		SD/ SEDERAJAT			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Polisi Pamong Praja Pelaksana	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	3	2
2	Polisi Pamong Praja terampil	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
3	Polisi Pamong Praja ahli	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1
4	Analisis perencanaan ahli muda	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah	-	-	4	2	-	-	6	2	-	-	-	-	10	4

Sumber: Satpol PP Kab Luwu Timur

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur yang bersifat taktis strategis dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau yang mungkin timbul, mengandung visi, misi, dan nilai-nilai, serta faktor penentu keberhasilan tujuan dan sasaran serta disusun dan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur. Fungsi Renstra Satpol PP adalah sebagai acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dalam jangka waktu Lima Tahun, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok yang diembannya.

A. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

Visi, dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik pada masa bakti 2021-2026 merupakan keberlanjutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

VISI

"Luwu Timur Yang Berkelanjutan dan Lebih Maju berlandaskan nilai agama dan budaya".

Artinya melanjutkan pembangunan daerah menuju kabupaten Luwu Timur yang lebih maju, sejahtera dan mandiri melalui pengembangan ekonomi kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan berbasis sumber daya.

MISI

Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat menyeluruh
2. Mengembangkan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Meningkatkan pemerintahan dan pelayanan public yang lebih baik
5. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya

Dari 6 (enam) Misi tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja mendukung Misi pada nomor (5) yaitu “mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat”. Dalam menjaga Stabilitas Keamanan Wilayah peranan Satpol PP sangatlah penting, hal tersebut disebabkan karena berkaitan erat dengan tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang telah direncanakan Satpol PP optimis mampu mendukung untuk mewujudkan Misi Bupati/Wakil Bupati Luwu Timur.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai ke depan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah

semua program dan aktifitas/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur dirumuskan sebagai berikut:

MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur sehingga dapat dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sasaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan dari tujuan yang ditetapkan. Fokus utama dalam penetapan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan organisasi.

Adapun sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1. Meningkatkan Ketenteraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif	• Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum • Meningkatnya pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum
2. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	• Meningkatnya kualitas dan pencapaian Kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) telah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran

keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan mengacu indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.

IKU ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar Pelayanan Minimal	Persentase standar teknis dan mutu pelayanan dasar SPM Bidang ketenteraman dan ketertiban umum	%	Hasil penjumlahan atas nilai kinerja indicator : 1. persentase SDM aparatur terlatih 2. persentase pemenuhan sarana dan prasarana minimal 3. persentase SOP ketenteraman dan ketertiban umum yang telah disusun 4. persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Dengan asumsi masing-masing indicator memiliki bobot yang sama 25%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	%	Jumlah (gangguan Trantibum Thn ke n-1) – (jumlah gangguan trantibum tahun ke n) / (jumlah gangguan trantibum tahun ke n-1) x 100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi Perhitungan
		Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/perkada	%	Jumlah (gangguan pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) – (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun ke n) / (jumlah pelanggaran perda dan perkada tahun n-1) x 100%

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Satpol PP dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menyusun penetapan kinerja setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2023 .

Dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Rencana Strategis menjadi tuntunan dan petunjuk yang memberi arah tujuan dan sasaran pada kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.

Perjanjian Kinerja berisi perjanjian kepala OPD dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kepada atasan langsung dalam hal ini Bupati Luwu Timur untuk mewujudkan target kinerja tahun berjalan.

Untuk dapat mengukur keberhasilan implementasi dari rencana strategis Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur menetapkan target untuk masing-masing kegiatan yang harus dicapai sebagai pelaksanaan dari program, kegiatan dan sub kegiatan. Target ini dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2023.

Adapun Penetapan/Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana Tabel 2.3 di bawah ini:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar pelayanan minimal	Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	68 %
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum sesuai standar	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan daerah	10%
		Persentase Penurunan Pelanggaran Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum	10%
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75,00

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik atas keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam memberikan pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, digunakan pengukuran kinerja yang dituangkan dalam bentuk satuan yang terukur dan terdiri dari pengukuran kinerja kegiatan, pencapaian sasaran tahunan dan analisis akuntabilitas kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Tahun 2023 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Aksi yang telah disepakati bersama.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Satpol PP pada Tahun 2023, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2022		2023		
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Standar teknis dan Mutu Pelayanan dasar SPM Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	66,99	55,82	68%	72,45	100%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban umum	Persentase penurunan pelanggaran Perda/perkada	9,10	8,93	10	9,22	92,20%
3		Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	9,10	9,06	10	9,56	95,60%
4	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	65,50	65,44	75,00	75,15	100,2%

N

**Sasaran
Strategis 1**

**Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum sesuai standar Pelayanan
Minimal**

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan 1 sebagaimana yang tertuang dalam renstra Satuan Polisi Pamong Praja yaitu “Meningkatkan ketenteraman dan Ketertiban umum yang mengarah kepada Kondisi yang aman dan kondusif”. Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum adalah standar pelayanan terhadap warga Negara yang terkena dampak dari gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat dari penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan Daerah atau peraturan Kepala daerah sebagaimana di atur dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pada Urusan ketenteraman, Ketertiban umum dan Perlindungan masyarakat. Untuk mengukur sasaran tersebut indikator yang digunakan adalah sebagai berikut :

Indikator	Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
------------------	---

Indikator ini mencerminkan tingkat pemenuhan standar teknis dan mutu Pelayanan Dasar bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum. Adapun analisis pencapaian kinerja atas indikator adalah sebagai berikut :

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Tabel 3.2

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan ketertiban umum	68%	72,45%	106,54%

Berdasarkan tabel diatas pengukuran kinerja indikator persentase pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum capaian kinerja nya 106,54 % dengan kriteria **Sangat Tinggi**.

Indikator ini diukur dengan menggunakan Formula :

$\% = a+b+c+d$ dengan asumsi masing-masing indikator diberi bobot 25%

a : Persentase SDM aparatur terlatih

b : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana minimal

c : persentase SOP Trantibum yang telah disusun

d : persentase warga Negara yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum perda/Perkada

➤ Persentase SDM aparatur terlatih

Tabel 3.3

Data SDM Satpol PP yang terlatih

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	YANG BELUM MENGIKUTI DIKLAT	YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT	JUMLAH SATPOL PP	KETERANGAN
1	PNS	35	4	39	DIKLAT DASAR

NO	STATUS KEPEGAWAIAN	YANG BELUM MENGIKUTI DIKLAT	YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT	JUMLAH SATPOL PP	KETERANGAN
2	UPAHJASA	83	125	208	Diklat SAR, Pelatihan Etika Birokrasi, Pelatihan Turjawali
TOTAL		118	129	247	

Dari tabel diatas dapat dihitung persentase SDM terlatih yaitu dengan cara membagi SDM yang telah belum mengikuti diklat dengan Jumlah SDM Satpol PP di kali 100% dan diperoleh hasil $118/247 \times 100\% = 52,22 \%$.

➤ Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana minimal

Sebagaimana di atur dalam Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja. Berikut tabel data sarana dan prasarana minimal Satuan Polisi pamong praja Tahun 2023:

Tabel 3.4
Daftar Sarana Dan Prasarana Minimal Tahun 2023

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
1	Bangunan Gedung	1	1
	a. Gedung Kantor	2	2
	- Ruang kerja pimpinan dan staf	1	1
	- Ruang pos jaga	7	10
	- Ruang rapat	2	2

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	- Ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan	-	2
	- Ruang penyimpanan barang/gudang	2	4
	- Ruang sekretariat PPNS	1	1
	- Ruang siding majelis kode etik	0	1
	- Tempat apel/upacara	1	1
	- Halaman parkir	1	1
	b. Gedung UPTD Kecamatan	0	11
2	Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan		
	a. Mobil Kepala Satuan	1	1
	b. Mobil Truk Dalmas	1	3
	c. Mobil Pengawalan	1	4
	d. Mobil Patroli	2	2
	e. Mobil operasional Kecamatan	2	11
	f. Motor Patwal	2	8
	g. Motor Patroli	21	25
	h. Motor Operasional	2	2
3	Perlengkapan Operasional		
	a. Perlengkapan perorangan dan beregu		
	- PDL	191	266
	- PDU	13	39

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	- Sepatu PDL	191	266
	- Topi PDU	13	39
	- Baret	35	266
	- Perlengkapan pataka	10	10
	- Tonfa dan holster tonfa	29	100
	- Borgol	0	30
	- Tameng	60	100
	- Senter	0	50
	- Ferplas	0	1
	- Tas/ ransel	0	100
	- <i>Sleeping bag</i>	1	100
	- Jaket	0	100
	- Rompi <i>body protector</i>	60	100
	- Masker	0	50
	- Matras/ velbad	30	100
	- Tenda peleton	4	4
	- Tenda Komando	0	3
	- <i>Handy Talkie</i>	20	50
	b. Perengkapan lainnya		
	- Tali carmantel	0	10

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	- Tandu	0	5
	- Perahu karet	0	3
4	Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
	- Note Book / Laptop	30	35
	- Computer PC	17	28
	- Printer	24	50
	- Absensi Digital	0	0
	- AC	21	50
	- Brankas	2	2
	- Faximili	1	1
	- Filling Cabinet	17	25
	- Lemari	5	22
	- Handycam	1	2
	- Kasur	5	25
	- Kipas angin	5	5
	- Meja Kantor	40	200
	- Mesin Ketik	0	0
	- Microfon sirene	1	1
	- Seprei	0	20
	- Tempat Tidur	10	25

NO	NAMA SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH (KONDISI BAIK)	JUMLAH STANDAR
	- Sirene/Rotari Mobil	1	1
	- Stavolt	0	0
	- Camera	3	3
	- Drone	1	1
	- Televisi	8	8
	- Kursi	93	250
TOTAL		992	2.639

Berdasarkan tabel diatas persentase sarana prasarana minimal dihitung dengan formula total sarana dan prasarana dalam kondisi baik di bagi jumlah sarana dan prasarana sesuai standar dikali 100% dan diperoleh hasil : $992/2639 \times 100\% = 37,58\%$. Sehingga persentase sarana dan prasarana minimal realisasnya untuk Tahun 2023 sebesar 37,58 %

➤ Persentase Standar Operasional Prosedur Trantibum yang terpenuhi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah dokumen SOP yang di susun dibagi target dokumen SOP yang disusun dikali 100%

Untuk Tahun 2023 ini, target indikator ini sebanyak 20 Dokumen SOP dan terealisasi 100% sehingga capaiannya 100%. Berikut daftar SOP yang telah disusun Tahun 2023 :

Tabel 3.5
Daftar Standar Operasional Prosedur Satpol PP Tahun 2023

NO	NAMA SOP
1	SOP Penindakan Yustisial
2	SOP Pengamanan Gedung Aset
3	SOP Patroli dengan berjalan kaki
4	SOP Patroli dengan kendaraan Roda Empat
5	SOP pelayanan Pengambilan Barang hasil Penertiban
6	SOP Penanganan Gelar Perkara
7	SOP Penanganan Pekerja Seks Komersial
8	SOP pelaksanaan Sidang ditempat
9	SOP pengerahan Satuan Perlindungan Masyarakat
10	SOP Pelayanan Pengaduan
11	SOP penanganan Pelanggaran Oleh PRC
12	SOP Deteksi Dini
13	SOP Cegah Dini
14	SOP pelayanan Dampak Penegakan Perda/Perkada
15	SOP Pelatihan Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP
16	SOP Pelatihan Pengembangan Kapasitas PPNS
17	SOP Penyusunan SOP Bidang SDM dan Sarpras
18	SOP Pengawasan dengan kendaraan Bermotor
19	SOP Penanganan unjuk Rasa
20	SOP Penanganan Kerusuhan Massa

- Persentase Warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat Penegakan Hukum Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala daerah

Pengukuran indikator ini melalui perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum Perda/Perkada di bagi Jumlah Warga Negara yang terkena dampak penegakan Hukum Penegakan Perda/perkada dikali 100 %

Layanan Dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada yang dimaksud dalam hal ini adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada warga Negara yang terkena dampak baik itu layanan pengobatan maupun layanan kerusakan materiil yang di akibatkan penegakan Peraturan daerah/Perkada.

Hal-hal yang dapat dapat menyebabkan dampak penegakan Peraturan Daerah diantaranya terjadinya kesalahan protap yang dilaksanakan pada saat dilakukan Penegakan Perda/Perkada, Minimnya Sarana dan prasarana yang dimiliki serta terbatasnya SDM terlatih yang dimiliki oleh Satpol PP.

Hasil dari pengukuran kinerja untuk indikator ini diperoleh capaian 100% hal tersebut dikarenakan selama tahun 2023 tidak ada warga Negara yang terkena dampak akibat dari Penegakan Perda/Perkada.

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2023 DENGAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Adapun untuk Sasaran Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai Standar Pelayanan minimal Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 hanya bisa diperbandingkan dengan Tahun 2022 hal tersebut disebabkan sasaran dan indikator ini baru ada pada renstra tahun 2021-2026 dan pengukurannya mulai dilakukan pada Tahun 2022.

.Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	2022			2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pemenuhan standar teknis dan mutu	66,99%	55,82%	83,32%	68%	72,45%	106,54%

	Pelayanan dasar SPM bidang Trantibum						
--	---	--	--	--	--	--	--

Dari tabel diatas perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja dari tahun 2022 dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2022 realisasi kinerja tidak dapat tercapai sehingga capaian kinerja berada pada angka 83,32 %. Hal ini disebabkan 2 dari 4 komponen indikator sebagai pengukur indikator persentase Pemenuhan standar teknis dan mutu Pelayanan SPM bidang Trantibum tidak tercapai. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin (A) untuk mengukur kinerja ini maka Formulasi perhitungannya adalah :

$$\forall = a+b+c+d \text{ dimana}$$

- Persentase SDM aparatur terlatih
- Persentase Sarana & Prasarana sesuai standar
- Persentase SOP Bidang Trantibum
- Persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada

Berikut kami sajikan tabel realisasi Tahun 2022 4 (empat) komponen pengukur indikator kinerja sasaran ini :

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Pengukuran Kinerja Tahun 2022

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SDM aparatur Terlatih	49,61%	49,34%	99,45%
2	Persentase Sarana & Prasarana sesuai standar	23,99%	23,99%	100%

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase SOP Trantibum yang dipenuhi	20	10	50%
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas indikator yang menyebabkan realisasi dan capaian kinerja tahun 2022 tidak mencapai target adalah persentase SDM aparatur terlatih dan persentase SOP Bidang Trantibum yang dipenuhi.

Sedangkan untuk Tahun 2023 capaian kinerja berada di angka 106,54 %, dari target 68% dan teralisasi 72,45 %.untuk mengetahui penyebab dari meningkatnya capaian kinerja Tahun 2023 berikut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase SDM Aparatur Terlatih	62,52	52,22	83,52%
	Persentase Sarana dan prasarana sesuai standar	40,56	37,58	92,65%
	Persentase SOP Bidang Trantibum	20	20	100%
	Persentase warga Negara yang mendapat layaan dampak akibat penegakan hukum perda/Perkada	100	100	100%

Dari tabel 3.8 tersebut diatas yang mempengaruhi capaian kinerja ini sehingga melebihi target adalah persentase SOP Bidang Trantibum dan persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat dari

pengakan hokum perda/Perkada. Walaupun 2 indikator yaitu persentase SDM aparatur terlatih dan persentase Sarana dan Prasarana yang sesuai standar belum mencapai target.

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase Pemenuhan standar teknis dan mutu pelayanan SPM Bidang Trantibum	72,45 %	73,75 %

Berdasarkan tabel 3.9 diatas perbandingan realisasi kinerja Tahun 2023 dengan target jangka menengah menunjukkan tren yang positif dimana terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan realisasi di tahun 2023 ini sangat signifikan sehingga akan mungkin melampaui target jangka menengah di tahun berikutnya. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan renstra untuk menyusun target jangka menengah yang baru dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perubahan tersebut.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR REGIONAL

Berdasarkan Lakip Satpol PP Provinsi Sulawesi Selatan baik secara sasaran maupun indikator yang digunakan berbeda dengan sasaran dan indikator kinerja yang digunakan oleh Satpol PP Kab. Luwu Timur sehingga untuk sasaran dan indikator kinerja ini tidak dapat di perbandingkan.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Untuk Mencapai Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang sesuai dengan standar Pelayanan Minimal” dengan indikator kinerja “Persentase Pemenuhan Standar teknis dan mutu layanan SPM Bidang Trantibum” dimana target yang di tetapkan sebesar 68% dan terealisasi 72,45% maka berikut analisis factor-faktor yang menyebabkan capaian kinerja dari indikator ini melebihi target :

- Bertambahnya SDM Penyusun SOP dari yang awalnya Penyusunan SOP teknis hanya dilakukan oleh Kasubag Perencanaan Satpol PP , dengan adanya coaching clinic penyusunan SOP yang di laksanakan oleh Bag.Ortala Setda Kab. Luwu Timur dan Satpol PP mengutus 3 orang peserta untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- Dalam menjalankan tugas penegakan perda/Perkada , Personil Satpol PP mengikuti Protap yang telah ada sehingga tidak menimbulkan dampak akibat penegakan perda/perkada
- Penempatan Satpol PP di kecamatan sangat membantu dalam melaksanakan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan adanya Satpol PP di kecamatan maka pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum lebih dekat ke masyarakat.

- Pemanfaatan media social dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses dan melakukan pengaduan dalam hal pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBDP Tahun 2023 untuk mendukung Sasaran ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar **Rp.7.795.937.040** dengan realisasi sebesar **Rp. 7.583.233.351** atau dengan rata-rata 97,27 % dengan capaian kinerja di atas 100% .berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini sebesar **2,94%**

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Efisiensi} &= \frac{\text{persentase capaian kinerja} - \text{persentase realisasi anggaran}}{\text{persentase realisasi anggaran}} \times 100\% \\ &= \frac{100\% - 97,27\%}{97,27\%} \times 100\% \\ &= 2,94\% \end{aligned}$$

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Sebagaimana di sebutkan pada poin (F) program yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator ini adalah program peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban umum . pada program ini terdapat 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan yang menunjang keberhasilan Sasaran “Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

Berikut rincian Kegiatan/sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dari sasaran ini :

- Kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. Adapun sub kegiatan yang mendukung adalah sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi Manusia.

Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian persentase SDM aparatur terlatih yang merupakan salah satu pemenuhan mutu dari Standar Pelayanan Minimal

- Sub Kegiatan Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan Prasarana Ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat.

Sub kegiatan ini mendukung pencapaian persentase sarana dan prasarana yang sesuai standar, yang juga merupakan pemenuhan mutu pelayanan standar pelayanan minimal

- Sub Kegiatan Penyusunan SOP ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat

Sub Kegiatan ini mendukung pencapaian persentase Standar Operasional Prosedur (SOP) Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dipenuhi, yang juga merupakan pemenuhan mutu pelayanan Standar Pelayanan Minimal

- Sub Kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan Perkada

Sub kegiatan ini mendukung pencapaian persentase warga Negara yang mendapat layanan dampak akibat penegakan hokum perda/Perkada . sub kegiatan ini merupakan standar teknis layanan SPM dalam layanan ganti rugi kerusakan materiil dan layanan pengobatan.

- Sub kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum seringkali membutuhkan tindakan penegakan hukum yang terkoordinasi. Dengan berkoordinasi antar

lembaga, penegakan hukum dapat dilakukan dengan efektif. Kerjasama dan koordinasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya dan strategi antar lembaga dan kemitraan untuk mencegah dan menaganai gangguan trantibum secara efektif

- Pembinaan pegawai negeri Sipil (PPNS) kabupaten/kota, terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - Sub kegiatan pengembangan kapasitas dan karier PPNS
- Sub kegiatan ini mendukung pencapaian SDM PPNS yang berkompeten. PPNS Satpol PP memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penyelesaian kasus pelanggaran perda/perkada.

**Sasaran
Strategis 2**

**Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban
Umum sesuai standar**

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur. Masih dengan tujuan yang sama dengan sasaran strategis 1 yaitu “Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang mengarah kepada kondisi yang aman dan kondusif” Untuk mengukur capaian kinerja dari sasaran tersebut terdapat 2 indikator yang digunakan yaitu :

1. Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/ Kepala Daerah
2. Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berikut analisis masing-masing indikator:

Indikator	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah/Kepala Daerah
-----------	---

Indikator ini menunjukkan tingkat penurunan angka pelanggaran peraturan Daerah/Kepala Daerah. adapun formula yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah :

$$\% = (a-b) : a \times 100\%$$

a : jumlah Pelanggaran Perda/Perkada Tahun sebelumnya

b : jumlah pelanggaran perda/Perkada Tahun ini

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja di uraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	10 %	9,22 %	92,20%

Bila dimasukkan kedalam formulasi perhitungan hasil pada tabel 3.10 di atas diperoleh dari :

a : jumlah pelanggaran perda Tahun 2022 sebanyak 943 kasus

b : jumlah Pelanggaran Perda tahun 2023 sebanyak 856 kasus

$$\begin{aligned}
 \text{sehingga } \% &= (943 - 856) / 943 \times 100\% \\
 &= 87/943 \times 100\% \\
 &= 9,22 \%
 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut target 10% dan realisasi 9,22 % itu berarti sekitar 0,78% selisih dari target yang harusnya dicapai.namun dengan capaian kinerja 92,20% sudah termasuk dalam kriteria tinggi.

Tabel 3.11
Data Pelanggaran Perda/Perkada Tahun 2023

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	LAPORAN	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
1	Garis Sempadan	PERDA NOMOR 5 TAHUN 2012	1	1	-
2	Minuman Beralkohol	PERDA NOMOR 3 TAHUN 2017	9	8	1
3	Izin Mendirikan Bangunan/ Bangunan Gedung	PERDA NOMOR 15 TAHUN 2010 DAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2011	-	-	-
4	Administrasi Kependudukan	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2012	-	-	-
5	Izin Lingkungan	PERDA NOMOR 7 TAHUN 2014	-	-	-
6	Gngguan Ketenteraman dan ketertiban dan keindahan	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014	378	378	-

No	Jenis Pelanggaran	Perda Yang Dilanggar	L A P O R A N	Tindak Lanjut/Penyelesaian	
				Non-Yustisi	Yustisi
7	Pemeliharaan Ternak	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2014		-	-
8	Penyelenggaraan Reklame	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2016	10	10	-
9	Pengelolaan Barang Milik Daerah	PERDA NOMOR 2 TAHUN 2017	-	-	-
11	Tertib Pendaratan Hasil Perikanan		-	-	-
12	Kawasan Tanpa Rokok	PERDA NOMOR 9 TAHUN 2016	122	122	-
13	Tera Ulang	PERDA NOMOR 1 TAHUN 2020	336	336	
14	Protokol Kesehatan	PERBUP NOMOR 23 TAHUN 2021	-	-	
15	Pengawasan Obat dan Makanan	PERDA NO 9 TAHUN 2014	-	-	
JUMLAH			856	855	1

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR

Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

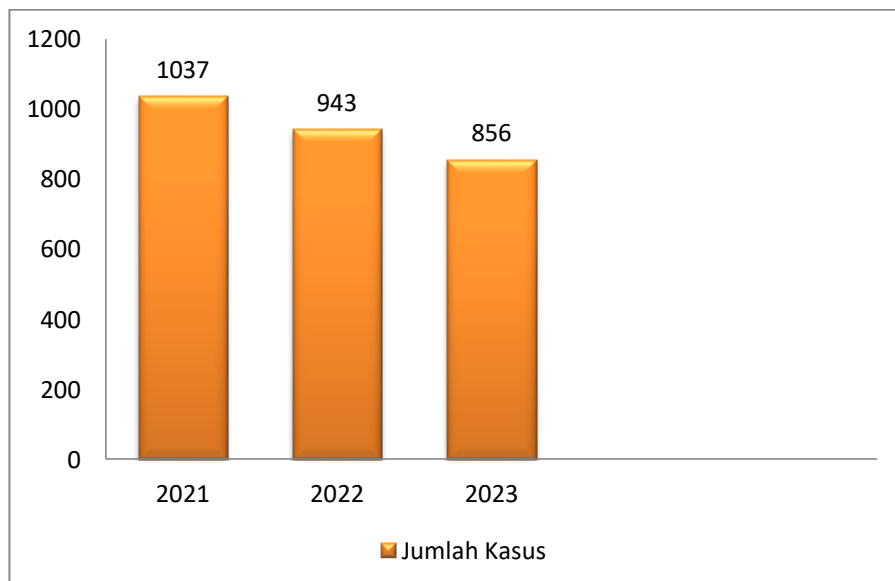
Tabel 3.12

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	9,10	9,06	99,56%	10	9,22	92,20%

Berdasarkan tabel 3.12 diatas, realisasi kinerja Tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,16 % , sementara bila dilihat dari capaian kinerja mengalami penurunan kinerja dari 99,56 % menjadi 92,20 % atau sekitar 7,36 %. Dari yang tahun 2022 mendapat kriteria sangat tinggi menjadi kriteria tinggi pada tahun 2023. berikut grafik pelanggaran perda 3 (tiga) tahun terakhir yang memiliki tren positif menurun setiap tahunnya.

Grafik 1.1
Data Pelanggaran Perda
Tahun 2021-2023



C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 3.13

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI S.D TAHUN 2023	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Perda/Perkada	9,22 %	14,28%

Berdasarkan tabel 3.13 diatas antara realisasi tahun 2023 dengan Target jangka menengah menunjukkan tren yang positif terus mengalami peningkatan. Tingkat penurunan Pelanggaran perda/Perkada dari Tahun 2022 s.d 2023 terus mengalami peningkatan yang berarti apa yang direncanakan dalam renstra organisasi sejalan dengan apa yang telah direalisasikan.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR REGIONAL/NASIONAL

Perbandingan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar Nasional/Regional tidak dapat disajikan. Mengingat sasaran dan indikator yang dimiliki kab/Kota se Sulsel berbeda-beda sehingga untuk mengukur perbandingan itu juga tidak dapat dilakukan.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

- Terbatasnya SDM yang berkualitas dan handal

Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang terus meningkat membuat setiap organisasi harus mampu menciptakan inovasi yang berbasis aplikasi utamanya dalam pelaksanaan penegakan perda/perkada sehingga masyarakat dapat lebih mudah melakukan pelaporan terkait adanya pelanggaran perda/perkada dan penanganan pelanggaran juga dapat ditindaklanjuti lebih cepat namun kendala yang dihadapi untuk bisa merealisasikannya adalah jumlah SDM yang berkualitas dan handal masih terbatas.

Untuk mengatasi hal tersebut, Satpol PP berupaya untuk meningkatkan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan workshop/workshop yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun Kementerian.

- Terbatasnya Sarana dan Prasarana penunjang aktifitas

Sebagaimana telah dibahas pada sasaran 1 indikator 1 di atas sarana dan prasarana yang tersedia baru terpenuhi sekitar 37,58 % dari jumlah sarana prasarana standar yang harus dipenuhi. Salah 1 (satu) contoh sarana prasarana yang sangat dibutuhkan saat ini adalah kendaraan operasional roda empat minibus untuk bisa lebih memudahkan pelaksanaan operasi yang sifatnya tidak sementara kendaraan roda empat yang tersedia saat ini adalah kendaraan roda empat dengan bak terbuka. Sehingga sasaran operasi lebih cepat mengetahui adanya operasi dan operasi tidak mendapatkan hasil yang diinginkan.

Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan pinjam pakai ke OPD lain atau sewa, selain itu mengusulkan dalam perencanaan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana secara bertahap.

- Belum terbentuknya unit pelaksana Satpol PP kecamatan

Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan ketenteraman dan Ketertiban umum di masyarakat. Namun hingga saat ini UPTD Satpol PP kecamatan ini belum terbentuk.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, Kepala Satpol PP mengeluarkan Surat Perintah Tugas Penempatan Satpol di 11 (sebelas) Kecamatan yang ada di Kab. Luwu Timur

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBDP Tahun 2023 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar **Rp.542.048.740** dengan realisasi sebesar **Rp. 541.244.106** atau dengan rata-rata 99,85 % sehingga efisiensi anggaran yang diperoleh sebesar **0,15 %**.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 3(tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang ditunjang oleh sub kegiatan sebagai berikut :
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Sub Kegiatan ini focus kegiatannya adalah pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah/Kepala Daerah kepada masyarakat yang secara rutin dilaksanakan. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 196.654.640 dan terealisasi sebesar Rp.196.522.830.

- Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
Sub Kegiatan ini focus kegiatannya sesuai dengan nama sub kegiatannya yaitu pelaksanaan pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda/Perkada. Dengan anggaran sebesar Rp. 161.483.000 dan terealisasi sebesar Rp. 161.170.676.
- Penanganan atas pelanggaran peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
Sub kegiatan ini pelaksanaan kegiatannya berupa penyelidikan dan penyidikan kasus, operasi penegakan perda/Perkada dan proses penegakan hukum perda/Perkada hingga ke pengadilan(bila ada). Dengan anggaran yang di sediakan sebesar Rp. 183.483.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 183.550.600,-

Indikator	Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum
-----------	--

Indikator ini digunakan untuk mengukur penurunan angka gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban umum yang dimaksud dalam indikator ini adalah 16 (Eam Belas) tertib yang termuat dalam perda Kabupaten Luwu Timur nomor 9 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum. 16 (enam belas) tertib tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tertib Bangunan
2. Tertib Jalan
3. Tertib Lingkungan
4. Tertib Pendidikan
5. Tertib jalur hijau,taman dan tempat umum
6. Tertib pedagang kreatif lapangan(PKL) dan pasar
7. Tertib pemeliharaan ternak
8. Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

9. Tertib aparat sipil Negara
10. Tertib Sosial
11. Tertib Kesehatan
12. Tertib angkutan sungai dan angkutan darat
13. Tertib social
14. Tertib sungai, drainase dan pesisir pantai
15. Tertib pendaratan ikan
16. Tertib Usaha Tertentu

Adapun untuk mengukur indikator ini digunakan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$\% = (a-b) : a \times 100\% \text{ dimana}$$

a : jumlah gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum Tahun lalu sebanyak 418 kasus

b : jumlah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum tahun ini sebanyak 378 kasus

A. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.14

Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1	Persentase penurunan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum	10 %	9,56 %

Dari tabel 3.14 diatas realisasi kinerja diperoleh dengan menggunakan formula perhitungan yaitu :

$$\begin{aligned}
 \% &= (418-378) : 418 \times 100\% \\
 &= 40 : 418 \times 100\% \\
 &= 9,56 \%
 \end{aligned}$$

Dengan realisasi kinerja 9,56 % maka capaian kinerja 95,60 % sehingga masuk dalam kategori kriteria Sangat tinggi. Walaupun masuk dalam kriteria tinggi namun hal ini belum mencapai target yang diinginkan yaitu 10 %. Berikut data gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum Tahun 2023

Tabel 3.15

Data gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Tahun 2023

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
1	Tertib Pendidikan	Pelajar berkeliaran di luar sekolah pada jam sekolah; Pelajar mabuk lem dan obat-obatan	106	106	Memberikan pembinaan fisik dan surat pernyataan tidak mengulangi; orang tua dan guru dipanggil untuk pembinaan lebih lanjut.
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Baliho, Spanduk dan Jenis Iklan/Media Informasi pada Pohon, Tiang Listrik dan Fasilitas umum lainnya	95	95	Menurunkan/mencabut APK, Baliho dan Spanduk serta bentuk Iklan/Media Informasi lainnya yang mengganggu ketertiban umum dan keindahan.
3	Tertib Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan Pasar	Berjualan pada bahu jalan	77	77	Memberikan pemahaman (persuasif) agar tidak menjual pada bahu jalan; bersama-sama pemilik memindahkan lapak dan barang dagangan ketempat yang sesuai dengan aturan.
4	Tertib Pemeliharaan Ternak	Hewan ternak berkeliaran di jalan; Kandang yang dekat dengan pemukiman	4	4	Memberikan teguran kepada pemilik ternak agar mengembalikan ternaknya sesuai aturan peternakan; memberikan pemahaman kepada pemilik kandang ternak agar dipindahkan ke tempat yang jauh dari pemukiman. Membantu

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
					bersama-sama memindahkan
5	Tertib Lingkungan	Penambangan galian Gol.C	56	56	Menghentikan operasional tambang galian Gol.C karena tidak memiliki Izin Lingkungan.
6	Tertib Bangunan	Melanggar sempadan jalan; mendirikan bangunan tanpa IMB	3	3	Memberikan pemahaman (persuasif) agar segera mengurus perizinan bangunannya dan menghentikan sementara sampai lengkap dokumen perizinannya; untuk bangunan yang melanggar sempadan diberikan pernyataan untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar.
7	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	Menjual minuman beralkohol; pelayan diduga melakukan praktik prostitusi	-	-	Menghentikan operasional THM; pemilik diberikan surat pernyataan tidak akan membuka kembali dan kepada pelayan yang rata-rata berKTP luar Luwu Timur diberikan pernyataan untuk kembali ke daerah asal.
8	Tertib Aparatur Sipil Negara	ASN bolos kerja kedapatan di pasar tanpa izin	1	1	Membuat surat pernyataan agar tidak lagi mengulangi perbuatannya
9	Tertib Sosial	Meminta sumbangan dengan surat legalitas palsu			Mengamankan peminta sumbangan tersebut dan membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
10	Tertib Kesehatan	Merokok pada KTR; menjual mamin kadaluarsa	-	-	Melakukan teguran dan sosialisasi agar tidak lagi merokok pada KTR; melaporkan kepada pejabat yang berwenang menangani mamin kadaluarsa.
12	Tertib Jalan	Material bahan bangunan yang berada diatas badan jalan/trotoar,	25	25	Memindahkan material atau kendaraan yang berada diatas trotoar/bahu jalan

No	Jenis Tertib	Jenis Gangguan	Temuan/ Laporan	TL	Bentuk Tindak Lanjut
		mobil yang terparkir lama di bahu jalan			
13	Tertib angkutan sungai dan angkutan darat	Kendaraan bak terbuka yang memuat pasir	6	6	Memberikan teguran kepada pemilik truk untuk menggunakan terpal sebagai penutup bak saat memuat material pasir
14	Tertib drainase	Mendirikan bangunan tempat usaha diatas drainase	5	5	Memberikan teguran kepada pemilik usaha yang ditemukan
	Jumlah		378	378	

Sumber: Bidang Trantibumlinmas Satpol PP

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.16

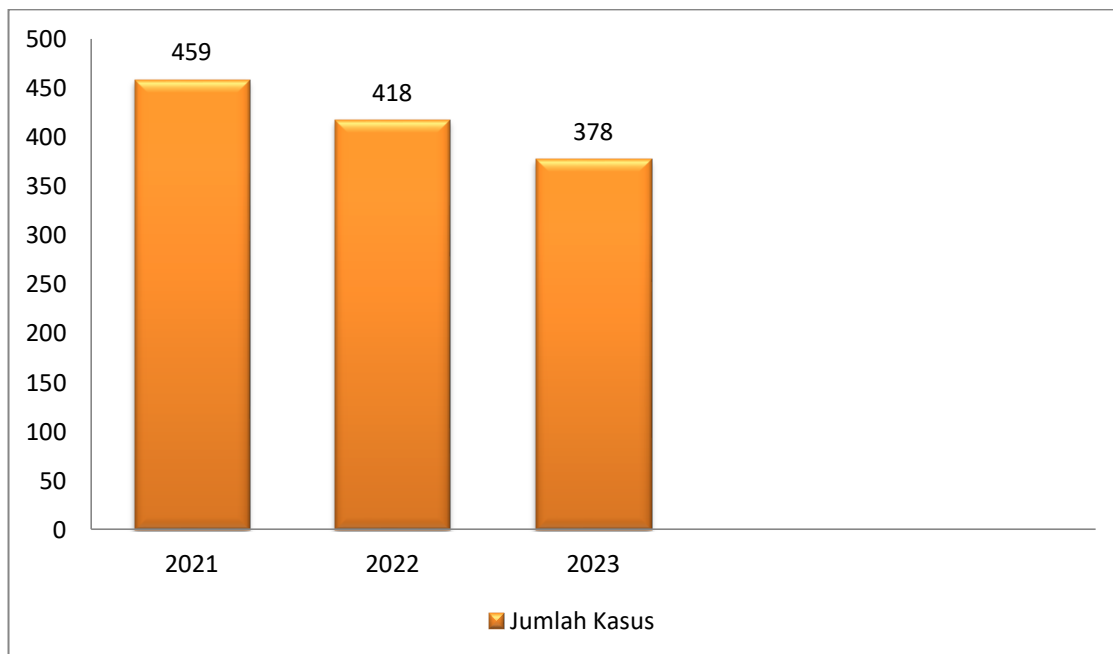
Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dan Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA	2022			2023		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	9,10	8,93	98,15 %	10	9,56	95,60%

Berdasarkan tabel 3.16 d atas, bila di lihat dari sisi realisasi kinerja antara tahun 2022 dengan tahun 2023 terjadi peningkatan angka penurunan gangguan Trantibum sekitar 0,63 % namun bila dari segi capaian kinerja antara tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi penurunan capaian sekitar 2,55 %. Namun bila melihat dari target yang ada, reaisasi dan capaian kinerja masih berada dalam kriteria sangat tinggi.

Angka penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum selama 3 (Tiga) tahun terakhir menunjukkan tren positif yang dapat dilihat pada grafik berikut ;

Grafik 1.2
Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2021-2023



C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH DALAM PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Perbandingan anatara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 3.17

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Jangka
Menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI TAHUN 2023	TARGET JANGKA MENENGAH
1	Persentase Penurunan gangguan ketenteraman dan Ketertiban umum	9,56 %	14,28%

Dari tabel diatas antara realisasi tahun 2023 dengan target jangka menengah menunjukkan tren positif mengalami peningkatan angka penurunan gangguan trantibum. bila melihat realisasi 3 (tiga) tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan angka penurunan maka Selama 3 (tiga)tahun ke depan target jangka menengah sebesar 14,28% diharapkan dapat tercapai dengan upaya-upaya yang dapat mendukung dan menunjang capaian tersebut.

D. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar regional maupun nasional tidak dapat dilakukan karena indikator pengukuran yang di gunakan Kab/Kota berbeda dengan indikator yang digunakanKab. Luwu Timur.

E. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN

➤ **Belum terbentuknya UPT Satpol PP Kecamatan**

Kabupaten Luwu Timur terdiri dari 11 kecamatan dimana jarak dari satu kecamatan dengan kecamatan lain tidak lah dekat hal ini tentu saja menghambat pelaksanaan penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban umum sehingga perlu dilakukan pendekatan pelayanan trantibum kepada masyarakat dengan membentuk UPT satpol PP Kecamatan. Namun pembentukan UPT satpol PP Kecamatan ini belum dapat dilakukan karena regulasi SOTK dari UPT Satpol PP kecamatan belum di atur secara rinci.

Untuk mengatasi belum terbentuknya UPT Satpol PP kecamatan tersebut melalui persetujuan Bupati dilakukan penempatan Satpol PP di kecamatan dengan mengeluarkan surat perintah penempatan.

➤ **Belum Maksimalnya keterlibatan Satlinmas Desa**

Satlinmas sebagai petugas yang paling dekat pelayanannya kepada masyarakat di harapkan keterlibatannya serta aktif dalam melakukan deteksi dan cegah dini gangguan trantibum Namun di beberapa desa masih terdapat satlinmas yang belum aktif dan terlibat dalam penanganan gangguan trantibum. Bila semua satlinmas aktif dan terlibat dalam penanganan gangguan trantibum maka tingkat penurunan gangguan trantibum akan meningkat.

Upaya yang dilakukan dalam mengaktifkan petugas perlindungan masyarakat ini adalah dengan membentuk petugas pemberdayaan satlinmas dan rutin melakukan monitoring dan evaluasi satlinmas di desa-desa.

- Minimnya anggaran operasional Satpol PP kecamatan

Dengan adanya penempatan Satpol PP di 11 (sebelas) kecamatan maka sejalan dengan itu disediakan anggaran operasional bagi petugas Satpol PP Kecamatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Dikarenakan belum dibentuk UPT sehingga anggaran tersebut melekat pada anggaran bidang trantibumlinmas sehingga penyediaan anggarannya pun sangat terbatas.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan melakukan koordinasi dengan TAPD , mengusulkan penambahan anggaran operasional bagi petugas Satpol PP kecamatan.

F. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan di APBDP Tahun 2023 untuk mendukung Sasaran dan indikator ini adalah 1 program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan ketertiban umum dengan total anggaran sebesar Rp.5.567.376.800 dengan realisasi sebesar Rp. 5.506.677.135 atau dengan rata-rata 98,90 % sehingga efisiensi anggaran yang diperoleh sebesar 1,1 %.

G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan sasaran dari indikator ini terdiri dari 1 (satu) Program, 1 (satu) kegiatan dan 4(tiga) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

- Sub kegiatan pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan

dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan.

Kegiatan operasional penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sumber anggarannya dari sub kegiatan ini. termasuk juga operasional petugas Satpol PP kecamatan, deteksi dan cegah dini, patroli, pengamanan asset, pengamanan kegiatan masyarakat serta pengawalan pejabat. Jumlah anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 5.450.057.500

- Sub Kegiatan Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda/perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa

Sub kegiatan ini mengatur anggaran operasional untuk kegiatan penertiban, penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 78.409.300,-

- Sub kegiatan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat/kab. Kota

Sub kegiatan ini mengatur koordinasi terkait ketenteraman dan ketertiban umum antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah propinsi sulsel, pemerintah kecamatan dan desa.

Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 70.185.000.

- Sub kegiatan pemberdayaan Perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum

Sub kegiatan ini mengatur kegiatan pemberdayaan Satlinmas didesa Desa/kelurahan. Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 68.725.000,-.

**Sasaran
Strategis 3**
**Meningkatnya Kualitas Dan Pencapaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat
Daerah**

Pada sasaran strategis 3 yang merupakan Sasaran penunjang urusan diukur dengan indikator nilai Sakip. SS3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi mengimplementasikan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dalam mewujudkan pelayanan umum yang Prima. Sasaran ini sesuai yang tertuang dalam renstra dengan tujuan yaitu “Meningkatkan akuntabilitas Penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah”

A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Tabel 3.18

Perbandingan Antara Target Dan Realisasi Kinerja

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Nilai Sakip Satpol PP	75,00	75,15	100,2 %

Nilai Sakip diperoleh dari hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kab. Luwu Timur setiap tahunnya. Pada tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan pada Sakip 2022 dengan nilai 73,15 persen atau kategori BB (Sangat Baik) sehingga realisasi capaian kinerja Nilai Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur yaitu 100,2%, capaian kinerja tercapai dengan kriteria Sangat Tinggi.

Hasil evaluasi Sakip Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu

Timur seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

NO	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30,00	27,00
B	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50
C	Pelaporan Kinerja	15,00	11,40
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	225,00	14,25
Nilai Akuntabilitas Kinerja			75,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 3.19

Perbandingan Realisasi Kinerja Dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Dan Tahun-Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2021(SAKIP TAHUN 2020)		TAHUN 2022(SAKIP TAHUN 2021)		TAHUN 2023(SAKIP TAHUN 2022)	
		REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN	REALISASI	CAPAIAN
1	NILAI SAKIP	62,19	95,76 %	65,44	99,90%	75,15	100,2%

Dari tabel di atas nilai sakip Satpol PP Kab. Luwu Timur dari Tahun ke Tahun terus mengalami peningkatan baik dari segi realisasi kinerja maupun dari segi Capaian kinerja

C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI DAN STANDAR NASIONAL

Tabel 3.20

Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah Dan Standar Nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TARGET JANGKA MENENGAH	STANDAR NASIONAL
1	Nilai Sakip	75,15	85,00	

Jika dibandingkan dengan Target Jangka Menengah, ke empat indikator Kinerja yang diraih Tahun 2022 ini menunjukkan trend yang positif dimana dari tahun ke tahun nilainya cenderung naik.

D. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan, perlu adanya koordinasi yang baik antar SubBagian Perencanaan dan Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Sekretariat Satpol PP Kab. Luwu Timur .Dari analisis penyebab keberhasilan nilai SAKIP diantaranya mengikuti kegiatan terkait Sakip

yang diselenggarakan oleh Bagian Organisasi Setda Kab. Luwu Timur sebagai berikut :

- Mengikuti coaching clinic Sakip bagi seluruh Perangkat Daerah pada tanggal 9 s.d 10 Juni 2023 bertempat di Hotel Gammara Makassar.
- Pemanfaatan media social baik dalam hal penyebaran informasi maupun penerimaan informasi sehingga sangat memberi kemudahan dalam melakukan perbaikan-perbaikan untuk peningkatan kinerja.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Anggaran yang ditetapkan pada APBD TA 2023 untuk mendukung pencapaian sasaran ini terdiri dari 1 Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 5.695.161.710 dengan realisasi sebesar Rp.5.462.041.233 atau rata-rata 95,91 %. Dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100,2%, berarti tingkat efisiensi yang mendukung sasaran ini adalah sebesar 4,09 %.

F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran di atas adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Luwu Timur . Program ini didukung oleh 9 (Sembilan) kegiatan dan 37 (tiga puluh Tujuh) Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian seperti dibawah ini :

- 1) Sub Bagian perencanaan dan keuangan sebanyak 3 (Tiga) kegiatan yang terdiri dari 16 (Enam Belas) sub kegiatan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebanyak 6 (enam) kegiatan yang terdiri dari 21 (dua Puluh Satu) sub kegiatan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Perubahan Anggaran Perubahan Satpol PP Tahun anggaran 2023 rincian anggaran sebagai berikut:

- a) Belanja Operasi sebesar Rp. 12.599.134.750,00 terealisasi sebesar Rp.12.168.162.662,00 atau 96,58%;
- b) Belanja Modal sebesar Rp. 892.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 877.111.922,00 atau 98,33%;

1. Aspek Pendapatan Daerah

Hingga akhir Tahun 2023, realisasi Pendapatan Daerah yang bersumber dari denda miras berdasarkan keputusan pengadilan Rp. 505.000,-

- 2. Tahun 2023 realisasi Belanja Daerah dengan alokasi sebesar Rp. 13.491.134.750,00 terealisasi sebesar Rp. 13.045.274.584,00 atau 96,70% dengan membiayai 2 (Dua) Program 11 (sebelas) kegiatan Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja untuk masing-masing program/kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Realisasi Keuangan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur
Tahun Anggaran 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2023		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.695.161.710	5.462.041.233	95,91	233.120.477	4,09
<i>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	122.736.480	122.010.110	99,41	726.370	0,59
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36.507.200	36.341.080	99,54	166.120	0,46
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.111.000	2.106.000	99,76	5.000	0,24
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.325.000	2.292.600	98,61	32.400	1,39
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.470.000	2.431.600	98,45	38.400	1,55
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen perubahan DPA-SKPD	2.788.980	2.782.980	99,78	6.000	0,22
Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	34.428.500	34.121.000	99,11	307.500	0,89

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2023		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.105.800	41.934.850	99,59	170.950	0,41
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.115.985.004	3.971.089.567	96,48	144.895.437	3,52
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.020.764.204	3.876.922.917	96,42	143.841.287	3,58
Penyediaan Adminsitrase Pelaksanaan Tugas ASN	36.560.000	36.560.000	100,00	0	0,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	2.013.400	2.003.400	99,50	10.000	0,50
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	25.205.000	24.225.000	96,11	980.000	3,89
Pengelolaan dan bahan tanggapan Pemeriksaan	4.168.000	4.148.000	99,52	20.000	0,48
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	27.274.400	27.230.250	99,84	44.150	0,16
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	36.329.526	36.022.672	99,16	306.854	0,84
Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik Daerah SKPD	5.230.000	5.161.500	98,69	68.500	1,31
Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Barang milik Daerah	10.182.980	9.972.980	97,94	210.000	2,06
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.916.546	20.888.192	99,86	28.354	0,14
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	156.905.500	101.609.265	64,76	55.296.235	35,24

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2023		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.629.500	7.087.850	92,90	541.650	7,10
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	21.707.000	21.543.100	99,24	163.900	0,76
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	39.960.000	6.409.800	16,04	33.550.200	83,96
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.959.000	2.333.865	58,95	1.625.135	41,05
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	83.650.000	64.234.650	76,79	19.415.350	23,21
Administrasi Umum Perangkat Daerah	627.170.400	614.243.236	97,94	12.927.164	2,06
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14.696.100	7.196.100	48,97	7.500.000	51,03
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.178.000	10.168.000	99,90	10.000	0,10
Penyediaan bahan logistik kantor	4.932.500	4.634.985	93,97	297.515	6,03
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.645.000	16.645.000	100,00	0	0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.800.000	7.790.000	99,87	10.000	0,13
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.150.000	11.545.900	95,03	604.100	4,97
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.768.800	556.263.251	99,20	4.505.549	0,80

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2023		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325.100.000	319.974.422	98,42	5.125.578	1,58
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165.100.000	162.175.000	98,23	2.925.000	1,77
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	160.000.000	157.799.422	98,62	2.200.578	1,38
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95.219.800	83.918.801	88,13	11.300.999	11,87
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.736.800	7.409.300	95,77	327.500	4,23
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.483.000	61.509.501	84,86	10.973.499	15,14
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15.000.000	15.000.000	100,00	0	0,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.715.000	213.173.160	98,82	2.541.840	1,18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.100.000	15.067.000	99,78	33.000	0,22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	130.350.000	130.120.260	99,82	229.740	0,18

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2023		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.990.000	37.170.000	95,33	1.820.000	4,67
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	16.875.000	16.856.900	99,89	18.100	0,11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	14.400.000	13.959.000	96,94	441.000	3,06
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.795.973.040	7.583.233.351	97,27	212.739.689	2,73
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.213.603.300	7.003.230.545	97,08	210.372.755	2,92
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	5.450.057.500	5.292.279.485	97,11	157.778.015	2,89
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penganangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	78.409.300	75.833.150	96,71	2.576.150	3,29

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2023		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Massa					
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	70.185.000	69.943.950	99,66	241.050	0,34
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68.725.000	68.620.550	99,85	104.450	0,15
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	361.169.500	335.879.660	93,00	25.289.840	7,00
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	17.528.000	12.166.250	69,41	5.361.750	30,59
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Umum dan Ketertiban Masyarakat	1.143.425.000	1.133.012.500	99,09	10.412.500	0,91

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2023		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	10.669.000	9.280.000	86,98	1.389.000	13,02
Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	13.435.000	6.215.000	46,26	7.220.000	53,74
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	542.048.740	541.244.106	99,85	804.634	0,15
sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	196.654.640	196.522.830	99,93	131.810	0,07
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	161.483.000	161.170.676	99,81	312.324	0,19
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	183.911.100	183.550.600	99,80	360.500	0,20
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	40.321.000	38.758.700	96,13	1.562.300	3,87
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	40.321.000	38.758.700	96,13	1.562.300	3,87

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN S.D 31 Desember 2023		TOTAL SISA ANGGARAN	
		Rp	%	Rp	%
2	4	6	7 = (6/5*100)	10=4-6	11=(10/4*100)
TOTAL BELANJA	13.491.134.750	13.045.274.584	96,70	445.860.166	3,30

4.1 Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

Secara umum simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 adalah **Sangat tinggi**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
Simpulan Umum atas Capaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1	MENINGKATNYA PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SESUAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL	106,54%	SANGAT TINGGI
1	Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	106,54%	Sangat Tinggi
2	MENINGKATNYA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SESUAI STANDAR	93,90%	SANGAT TINGGI
1	Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah / Kepala Daerah	92,20%	Sangat Tinggi
2	Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	95,60%	Sangat Tinggi
	Rata – Rata Capaian	100,22%	Sangat Tinggi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat beberapa capaian kinerja yang belum mampu mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan yaitu **"Persentase Penurunan Pelanggaran Peraturan Daerah / Kepala Daerah"** 92,20% dan **"Persentase Penurunan gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum"** 95,60%. Meskipun demikian, rata-rata capaian Sasaran Strategis masih masuk dalam kriteria **Sangat Tinggi**.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan program kegiatan yang akan datang. Untuk mewujudkan tata pemerintahan dan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP Kab Luwu Timur masih adanya kendala dan kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dan penyesuaian dengan perkembangan dan situasi yang ada dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah strategik dimasa yang akan datang seperti :

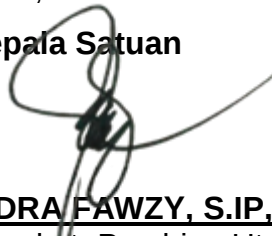
- Penyempurnaan perencanaan kegiatan dan penyusunan jadwal kegiatan yang lebih matang serta menghindari adanya tumpang tindih antar kegiatan maupun program.
- Peningkatan kualitas sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana, untuk mendukung pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur.
- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder lainnya serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum
- Peningkatan sosialisasi terhadap Perda dan Keputusan Bupati, ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara berkesinambungan dan terus-menerus.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerja keras partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh personil Satpol PP Kab. Luwu Timur, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. Hasil kerja itu nantinya menjadi cerminan sebagai tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 ini disusun, sebagai wujud pertanggungjawaban peran serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Malili, Januari 2024

Kepala Satuan



INDRA FAWZY, S.IP, M.Si.

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP. 19701103 199003 1 002

Lampiran 1



PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **INDRA FAWZY, S.IP, M.Si**

Jabatan : **KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU
TIMUR**

Selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**

Jabatan : **BUPATI LUWU TIMUR**

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malili, Oktober 2023

Pihak Kedua,

Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Pihak Kesatu,

INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TABEL KINERJA
TAHUN 2023

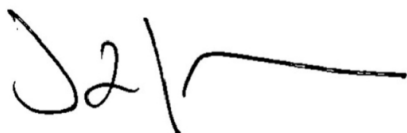
NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai Standar Pelayanan Minimal	- Persentase Pemenuhan Standar Teknis dan Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum	68%
2	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai standar	- Persentase penurunan pelanggaran perda/Perkada - Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum	10% 10 %
3	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah	Nilai Sakip	75

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran sebesar **Rp. 7.795.973.040 ,-**
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar **Rp. 5.695.161.710,-**

Malili, Oktober 2023

Pihak Kedua



Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

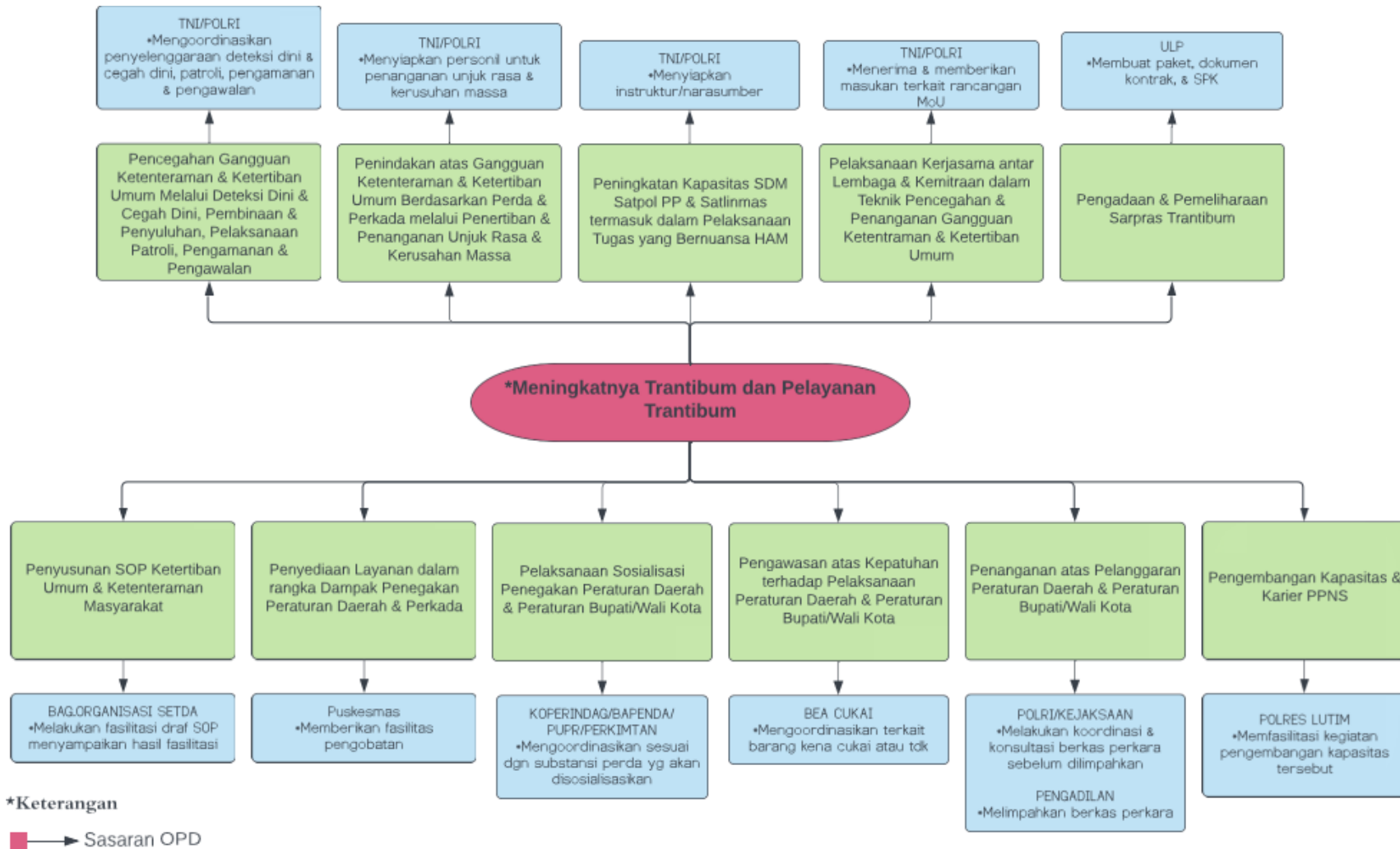
Pihak Kesatu



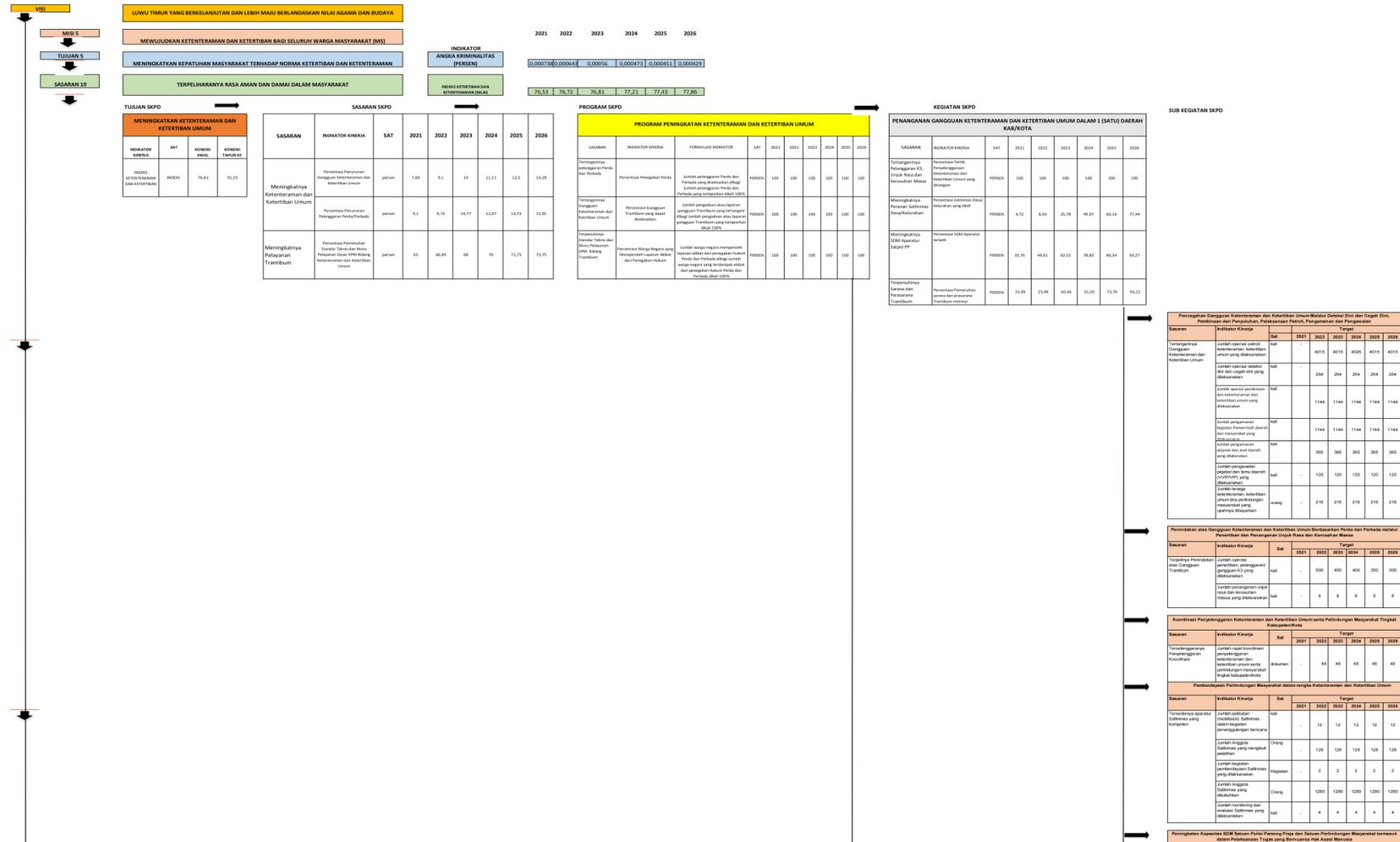
INDRA FAWZY, S.IP., M.Si.

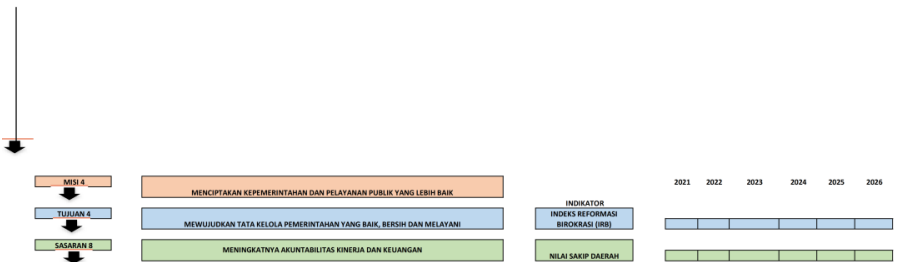
LAMPIRAN 2

CROSSCUTTING SATPOL PP KAB. LUWU TIMUR



CASCADING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. LUWU TIMUR





PPNS yang berkompeten	Persentase PPNS yang berkompeten	PERSEN	57,14	75	87,50	100	100	100
-----------------------	----------------------------------	--------	-------	----	-------	-----	-----	-----

Pengembangan Kapasitas dan Keter PPNS									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					2024	2026
			2021	2022	2023	2024	2025		
Terdapatnya PPNS yang berkompeten	Jumlah PPNS yang mendapat Pelatihan Pengembangan Kapasitas	orang	7	3	3	3	3	3	3
Jumlah Raker PPNS yang dilaksanakan (Pali)		hari	2	4	4	4	4	4	4
Jumlah Pali Personil Pali yang mengikuti (Jumlah Pali Orang)		orang	-	1	1	1	1	1	1

TUJUAN SKPD				
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH DAN MELAYANI (T4)				
INDIKATOR KINERJA	SAT	KUANTITAS	KUALITAS	KETERANGAN
INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)	PERSENTASE	CC	A	

SASARAN SKPD									
MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK									
INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Keefektifan layanan pelayanan publik	persen	7,69	9,1	10	11,11	12,5	14,28		

PROGRAM SKPD									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI INDIKATOR	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Peningkatan pelayanan publik	Persentase pemangku perangkat daerah tingkat satuan standar sesuai standar	Jumlah kapak panjang sesuai PD Standar sesuai standar Jumlah satuan pemangku sesuai PD x 100	PERSEN	100	100	100	100	100	100

KEGIATAN									
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terselenggaranya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase pemangku dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100

SUB KEGIATAN

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					2024	2026
			2021	2022	2023	2024	2025		
Terdapatnya dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					2024	2026
			2021	2022	2023	2024	2025		
Terdapatnya dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					2024	2026
			2021	2022	2023	2024	2025		
Terdapatnya dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					2024	2026
			2021	2022	2023	2024	2025		
Terdapatnya dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	Dokumen	2	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					2024	2026
			2021	2022	2023	2024	2025		
Terdapatnya dokumen DPA-SKPD yang disusun	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					2024	2026
			2021	2022	2023	2024	2025		
Terdapatnya dokumen laporan capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					2024	2026
			2021	2022	2023	2024	2025		
Terdapatnya dokumen evaluasi kinerja pemerintah daerah yang disusun	Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	Dokumen	11	8	8	8	8	8	8

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
INDIKATOR KINERJA	SAT	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Terselenggaranya Administrasi Keuangan APBD yang sesuai standar	Persentase Administrasi Keuangan yang selaras dengan bak	PERSEN	100	100	100	100	100	100	100

Penyediaan Dap dan Tunjangan ASN									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					2024	2026
			2021	2022	2023	2024	2025		
Meringkaskannya anggaran belanja ASN	Jumlah ASN yang pda dan anggaran belanja ASN	Orang	0	43	47	51	55	59	59
Pengadaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					2024	2026
			2021	2022	2023	2024	2025		
Terdapatnya administrasi pelaksanaan tugas ASN	Persentase administrasi administrasi pelaksanaan tugas ASN (%)	Persen	0	100	100	100	100	100	100
Pembinaan Peningkatan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					2024	2026
			2021	2022	2023	2024	2025		
Terdapatnya pembinaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Persentase pembinaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Persen	0	100	100	100	100	100	100
Koordinasi dan Pelaksanaan Koordinasi Akuntansi SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target					2024	2026
			2021	2022	2023	2024	2025		

Terdapatnya dokumen perencanaan keuangan (DFO)	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan dan perencanaan keuangan (DFO) yang dibuat	Dokumen	0	4	4	4	4	4	4
Pengelolaan dan penyajian Bahan Tanggapan Pembiayaan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terdapatnya bahan tanggapan pembiayaan	Persentase pemenuhan bahan tanggapan pembiayaan	Persen	0	100	100	100	100	100	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terdapatnya dokumen laporan keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan/bulanan/triwulanan/semesteran (DFO) yang dibuat tepat waktu	Persen	12	12	12	12	12	12	12
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terdapatnya dokumen laporan dan analisis progress realisasi anggaran	"Jumlah dokumen laporan dan analisis progress realisasi anggaran yang dibuat (Dokumen)"	Dokumen	0	0	1	1	1	1	1

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
Uraian	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
1. Pelaksanaan administrasi BMD yang terintegrasi dengan sistem	Persentase BMD yang terintegrasi dengan sistem	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah (SKPD)									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terdapatnya dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah (SKPD) yang dibuat (Dokumen)	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah (SKPD) yang dibuat (Dokumen)	Dokumen	0	2	2	2	2	2	2
Realisasi dan Penyajian Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terdapatnya dokumen laporan hasil realisasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	Jumlah dokumen laporan hasil realisasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terdapatnya dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang dibuat	Jumlah dokumen laporan penatausahaan BMD pada SKPD yang dibuat	Dokumen	4	12	12	12	12	12	12

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
Uraian	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
1. Pelaksanaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah sesuai Job	Persentase data kepegawaian Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan sistem	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Pengelolaan Pabean Dinas Sesuai Kebutuhan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terdapatnya pabean dinas sesuai kebutuhan yang dibuat	Jumlah pabean dinas sesuai kebutuhan yang dibuat	Dok	200	200	0	207	0	275	0
Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terdapatnya laporan data administrasi kepegawaian yang dibuat	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dibuat	Laporan	0	4	4	4	4	4	4
Pendataan dan Pelaporan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Meningkatnya pengumpulan dan penyajian laporan	Jumlah ASN yang dibuat sesuai kebutuhan tugas dan fungsi	Orang	0	47	47	47	47	47	47
Swakelola Peran dan Fungsi									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Meningkatnya pengumpulan dan penyajian laporan	Jumlah ASN yang dibuat sesuai kebutuhan tugas dan fungsi	Orang	44	47	47	47	47	47	47
Swakelola Peran dan Fungsi									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Meningkatnya pengumpulan dan penyajian laporan	Jumlah ASN yang dibuat sesuai kebutuhan tugas dan fungsi	Orang	4	10	10	10	10	10	10
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
Terdapatnya dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)	Jumlah dokumen laporan hasil monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai (Dokumen)	Dokumen	-	5	5	5	5	5	5

Administrasi Umum Perangkat Daerah									
Uraian	Indikator Kinerja	Sat	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028
1. Pelaksanaan administrasi umum	Persentase data kepegawaian Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan sistem	Persen	100	100	100	100	100	100	100

Penyusunan Rincian Anggaran									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2028

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terpeliharanya kendaraan dinas perorangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau jabatan yang dirawat	Unit	1	1	1	1	1	1	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diperbaiki dan dirawat	Unit	30	25	30	32	34	36	
Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	75	100	100	100	100	100	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terpeliharanya gedung kantor dan vila bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan vila bangunan lainnya yang diperbaiki/rehabilitasi	Unit	4	2	2	2	2	2	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
Sasaran	Indikator Kinerja	Sat	Target						
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dan vila bangunan lainnya yang diperbaiki/rehabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan vila bangunan lainnya yang diperbaiki/rehabilitasi	Unit	0	7	7	7	7	7	